

POLA ALTERNATIF PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT

Mencermati Trend perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan perkembangan yang meningkat. Bahwa angka yang terungkap hanya merupakan fenomena gunung es yang tampak hanya dipermukaan saja, sedangkan kedalamannya tidak terukur. Dan yang memprihatinkan, korban adalah mayoritas generasi muda yang produktif, sehingga apabila tidak segera diantisipasi dan dicegah maka bangsa ini akan segera menghadapi suatu ancaman rusaknya generasi penerus bangsa. Selain itu berpotensi pula merusak sendi-sendi sosial, budaya, ekonomi, politik yang sudah barang tentu dapat menghambat jalannya pembangunan nasional.

Trend-trend yang sangat tidak terpuji tersebut sudah lama menjangkit dan melanda generasi muda seperti; kenakalan remaja, judi, miras serta penyakit masyarakat lainnya.

Dari "Perilaku Haram" tersebut diatas sudah barang tentu membawa dampak yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain; dampak tersebut antara lain :

- 1.Kejahatan Kekerasan semakin meningkat.
- 2.Perkosaan dan pelecehan seks semakin merajalela.
- 3.Produktivitas remaja (pelajaran dan kreasi lainnya) menurun tajam.

Upaya membendung dan menghentikan perilaku remaja tersebut diatas terus dilakukan baik oleh pemerintah maupun tokoh masyarakat.

Dibeberapa daerah telah dan sedang melakukan beberapa pola dan kreasi, seperti halnya di kota Medan.Terobosan yang di "Awaki/di sponsori" oleh Forum Komunikasi Pemuda antar Agama (FKPA) Propinsi Sumatera Utara adalah melakukan kerjasama dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, prostitusi, judi dan kriminalitas lainnya. Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2002 FKPA Prop. Sumut bersama pemuka agama, tokoh masyarakat, majelis-majelis agama dan pimpinan redaksi serta diikuti oleh Muspida Sumut telah membicarakan berbagai masalah aktual, khususnya mengenai prostitusi, judi, narkoba dan kriminalitas lainnya. Berdasarkan pembicaraan tersebut semua pihak sepakat mengeluarkan pernyataan bersama sebagai berikut :

1. Sama-sama prihatin atas terus berkembangnya prostitusi, Judi, penyalahgunaan narkoba dan kriminalitas lainnya, yang jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama, nilai-nilai luhur bangsa dan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa faktor pendorong masih dominan dibanding faktor penangkal kegiatan negatif tersebut.

2. Akumulasi faktor pendorong kegiatan negatif tersebut amat besar, yang bersumber dari faktor-faktor global/internasional, nasional dan lokal. Oleh karena itu bersepakat untuk lebih serius dalam memperkuat faktor-faktor penangkal.

3. Dalam memperkuat faktor penangkal bersepakat melakukan langkah-langkah :

- a.Pencerahan/penyuluhan terhadap seluruh lapisan masyarakat.
- b.Penyadaran terhadap anggota masyarakat yang terjatun dalam kegiatan negatif tersebut.
- c.Penguatan terhadap anggota masyarakat dari segi fisik, mental/spiritual, ketrampilan, lapangan kerja dan kesejahteraan.
- d.Penegakan hukum /ketertiban terhadap kegiatan negatif tersebut.

4.Sangat disadari bahwa keberhasilan dari pelaksanaan langkah-langkah konkrit tersebut amat tergantung kepada dua prinsip, yaitu kebersamaan/partisipasi seluruh komponen masyarakat dan kesinambungan pelaksanaannya secara terus menerus. Maka dalam kerangka ini menyerukan :

- a.Kepada para orang tua/kepala keluarga dan paguyuban-paguyuban kekeluargaan, agar lebih cermat menjaga anggota keluarganya/sanak famili dari keterlibatan dalam



kegiatan negatif tersebut. Dalam hal ini, pola hidup dan pergaulan anak-anak, remaja putra dan remaja putri perlu mendapat perhatian khusus.

b. Kepada para pimpinan lembaga pendidikan, tenaga pengajar, agar lebih menekankan pendidikan agama dan budi pekerti, menertibkan tingkah laku dan pergaulan di lembaga masing-masing, khususnya menyangkut kegiatan negatif tersebut.

c. Kepada para pimpinan lembaga pendidikan/tenaga pengajar, agar lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan spirituil keagamaan dan menertibkan tingkah laku dan pergaulan para anggota dari keterlibatan dalam kegiatan negatif tersebut.

d. Kepada para pengkhotbah/dai/pendeta/pastor, agar lebih meningkatkan khotbah/pengajaran agama di kalangan jemaah masing-masing, khususnya dalam menanggulangi kegiatan negatif tersebut.

e. Kepada para pemimpin Daerah (Walikota/Bupati, Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Lingkungan) beserta aparat, instansi terkait beserta seluruh komponen masyarakat setempat, agar lebih mencermati dan mewaspadaai berlangsungnya kegiatan negatif tersebut di daerah/lingkungan masing-masing dan apabila ditemukan bukti-bukti yang jelas agar dilakukan tindakan-tindakan yang arif dan bijaksana sesuai hukum yang berlaku.

f. Kepada media massa (cetak dan elektronik) agar lebih meningkatkan fungsi pendidikan terhadap publik, lebih meningkatkan tulisan/program berita dalam rangka penanggulangan terhadap kegiatan negatif tersebut, demikian pulan agar mengutamakan persatuan dan kesatuan, membuat pemberitaan yang menyejukkan dan menghindari pemberitaan yang adapat memancing emosi publik ke arah yang negatif.

Berdasarkan pengalaman Polda Sumut dalam memerangi "Penyakit Masyarakat" dengan pola alternatif tersebut diatas; kepada para kasatwil/kasatker diharapkan dapat mengambil langkah-langkah :

1. Inisiatif yang baik dari masyarakat Sumut umumnya dan kota Medan khususnya mungkin bisa diajak dan dicoba kepada masyarakat di wilayah Satwil yang bersangkutan.
2. Fahami isi kesepakatan dan sosialisasi terhadap anggota juga masyarakat sekitarnya.
3. Berdayakan semua komponen masyarakat untuk memerangi penyakit masyarakat (molimo).
4. Materi, Metoda, Sasaran dan tujuan pembinaan agar dikoordinasikan dengan semua tokoh masyarakat.
5. Bina dan latih anggota untuk memahami masyarakatnya sehingga mahir dan terlatih dalam kemitraan yang akhirnya masyarakat memberi dukungan dalam menyelesaikan masalah tersebut di atas.

KAPOLRI BUKA DIK SESPATI POLRI DIKREG III TP . 2002

Polri yang mandiri dan profesional serta memiliki kemampuan manajemen strategi serta pola pikir dan wawasan luas, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional, salah satu jawaban tuntutan masyarakat yang semakin kritis dewasa ini.

yang mengharapkan agar Polri dapat mandiri serta lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta mampu sebagai penegak hukum yang profesional dan proporsional dengan tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan HAM.

Pelaksanaan pendidikan Sespati Dikreg III dengan tema "Mewujudkan masyarakat patuh hukum (Law Abiding Citizen) berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa".

Diharapkan dapat membentuk kemampuan kepemimpinan dan pembinaan bagi Pamen Senior dan para pejabat instansi lain yang memiliki kemampuan manajemen strategis dan berpotensi untuk promosi manajemen puncak, serta memiliki pola pikir dan wawasan yang terpadu, baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional dalam rangka penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.

Tujuan pendidikan tersebut diatas tentunya diharapkan dapat diwujudkan dalam masa pendidikan Sespati ini yang dilaksanakan selama 4 bulan. Oleh karena itu saya sangat menaruh harapan dan

meminta keseriusan semua pihak. Baik penyelenggara pendidikan, Widya Iswara maupun para peserta didik. Dapat dijelaskan pula kemandirian Polri dalam memberikan perlindungan,

Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum bukanlah Polri harus bekerja sendiri, namun harus tetap bekerja sama dengan TNI dan instansi terkait lainnya serta membutuhkan dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu wadah / lembaga maupun kegiatan-kegiatan bersama dalam rangka menciptakan komunikasi antara Polri dengan TNI maupun instansi lain yang terkait dalam momentum pendidikan dan latihan yang selama ini berjalan, agar tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga kerja sama dan hubungan harmonis yang selama ini terjalin dalam pelaksanaan kerjasama penegakkan hukum dapat tetap berjalan dengan baik.

Di akhir sambutannya, Kapolri berharap kepada seluruh peserta Pendidikan Sespati Polri, yang kali ini menggunakan metode pembelajaran sistem "Active Participant Centered Learning Process", dapat mengembangkannya dalam kepemimpinannya dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin berat dan kompleks.

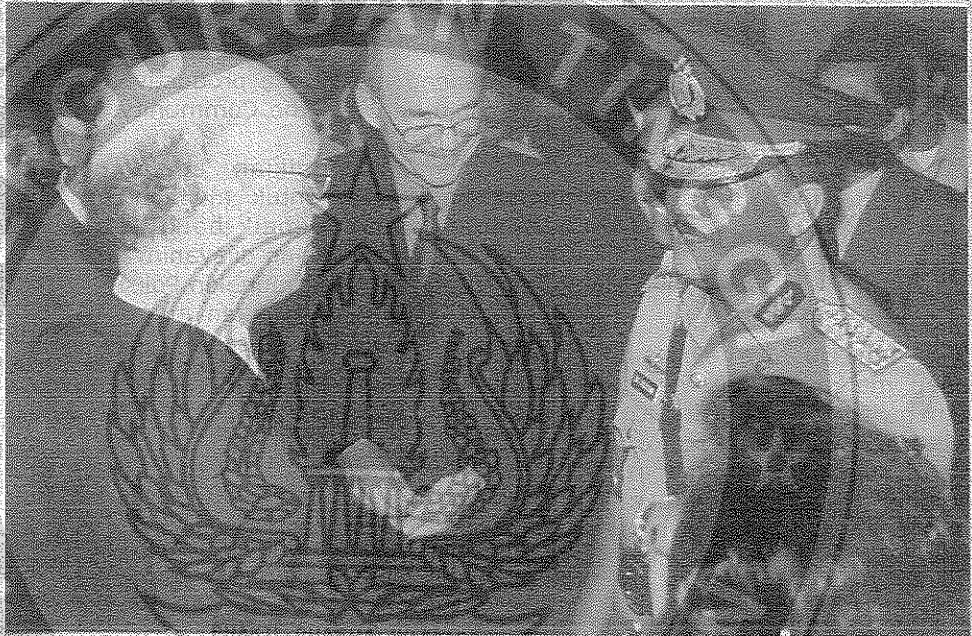
Peserta Dik Sespati Polri Dikreg III TP.2002 setingkat Komisaris Besar Polisi berjumlah 27 orang ditambah 3 peserta lainnya dari Kejaksaan Agung dan Departemen Kehakiman dan HAM direncanakan berlangsung selama 4 bulan.



Demikian antara lain arahan Kapolri pada kesempatan Pembukaan Dik Sespati Polri Dikreg III TP. 2002 yang diikuti para Pamen Senior setingkat Komisaris Besar Polisi tanggal 27 Agustus 2002 di Lembang, Bandung.

Kapolri mengatakan sejalan dengan Ketetapan MPR RI Nomor : VI/MPR/2000, tentang TNI dan Polri, maka dibidang pendidikan Polri secara bertahap dan berkesinambungan sedang membenahi sistem pendidikan Polri, yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan maupun pelatihan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis, untuk menjawab tuntutan pemerintah dan masyarakat

Kapolri Terima Utusan Kedutaan Amerika Serikat



Berkaitan dengan kunjungan Menlu AS Collin Powell ke Indonesia tadi hari Jumat (2/8), Kapolri Jendral Polisi Drs. Da'i Bachtiar, SH telah menerima Duta Besar keiling merangkap asisten khusus bidang terorisme Departemen Luar Negeri AS Mr. Francis Tailer. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai upaya kerjasama pemerintahan AS khususnya Kepolisian AS dengan POLRI menanggulangi masalah terorisme. Karena masing-masing pihak menyadari

bahwa terorisme bukan hanya masalah pemerintah AS atau pemerintah Indonesia saja, namun menyangkut keselamatan seluruh umat manusia di dunia ini.

Bentuk kerjasama lebih difokuskan pada upaya pertukaran informasi/sharing information tentang pola, teknik dan metode penanganan terorisme termasuk masalah jaringan terorisme internasional. Disamping itu jua

terorisme terhadap para anggota POLRI. Diharapkan masyarakat dapat memahami tujuan kerjasama tersebut, karena sama sekali tidak ada bargaining atau permintaan khusus dari pemerintah Indonesia khususnya Polri.